



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2017

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 - 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Nomor 800/964/BKPP tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana

Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

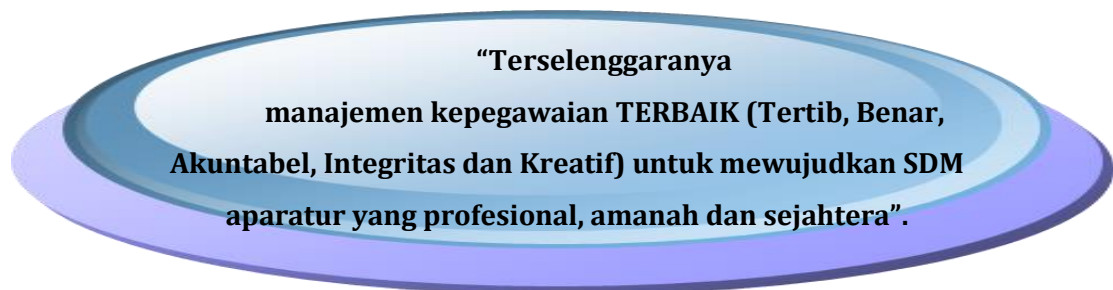
Renstra BKPP Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, karena BKPP mempunyai tupoksi sebagai SKPD yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan **Misi-2 RPJMD Kota Bandung** yakni **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani**.

Keterkaitan misi terdapat pada :

Tujuan	Terwujudnya reformasi birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
Indikator Kinerja	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dalam menetapkan visinya harus mengacu pada visi Kota Bandung dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”**.

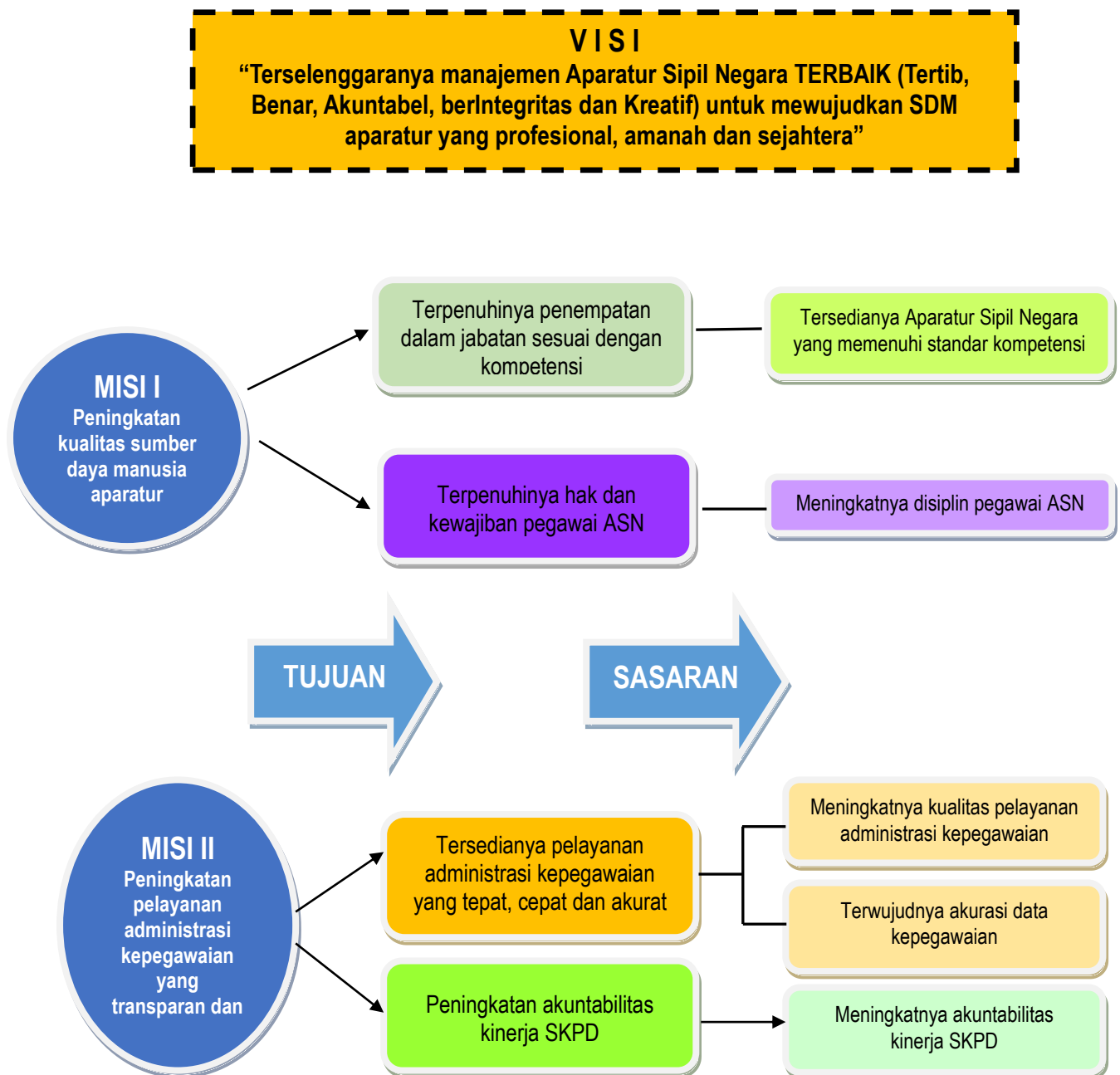
Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka **Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2013-2018** adalah :



Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan misi yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
- (2) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

Adapun keterkaitan antara Visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2013-2018 hasil reviu dengan tim Kemenpan-RB dapat dilihat pada gambar di bawah ini :





2.2. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama BKPP Kota Bandung Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi		
		- Kompetensi manajerial	Persentase	95,74
		- Kompetensi teknis	Persentase	90,30
		b. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	Orang	28
		c. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Persentase	82
2.	Meningkatnya disiplin pegawai ASN	a. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN	Persentase	100
		b. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	Persentase	78
		c. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN	Persentase	100
		d. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	a. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		
		- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Persentase	100
		- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	Persentase	100
		- Persentase pensiun pegawai tepat waktu	Persentase	100
		b. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	71
4.	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase pegawai ASN yang datanya akurat	Persentase	100

2.3. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Adapun target perjanjian kinerja BKPP Kota Bandung Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Target Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi - Kompetensi manajerial	Persentase	95,74
		- Kompetensi teknis	Persentase	90,30
		b. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	Orang	28
		c. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Persentase	82
2.	Meningkatnya disiplin pegawai ASN	a. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN	Persentase	100
		b. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	Persentase	78
		c. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN	Persentase	100
		d. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	a. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Persentase	100
		- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	Persentase	100
		- Persentase pensiun pegawai tepat waktu	Persentase	100
		b. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	71
4.	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase pegawai ASN yang datanya akurat	Persentase	100
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	a. Nilai Evaluasi AKIP	Angka	74
		b. Persentase Penurunan Temuan BPK/Inspektorat	Persentase	100
		c. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	Persentase	100